

## Ekonomi Politik Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Chairun Nissa<sup>1</sup>, Intan Alisa<sup>2</sup>, Muhammad Nabil Nasution<sup>3</sup>, Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author: [nisachairun883@gmail.com](mailto:nisachairun883@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [alisanasutionintan@gmail.com](mailto:alisanasutionintan@gmail.com)<sup>2</sup>, [mnabilnst@gmail.com](mailto:mnabilnst@gmail.com)<sup>3</sup>, [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

### Info Artikel

**Submitted:** 05 Desember 2025

**Revised :** 11 Desember 2025

**Accepted:** 30 Desember 2025

**Published:** 02 Januari 2026

**Keywords:** Political Economy, Poverty, Public Policy

**Kata Kunci:** Ekonomi Politik, Kemiskinan, Kebijakan Publik

### Abstract

*This study aims to analyze poverty alleviation programs in Indonesia from a political economy perspective by highlighting the role of the state, political dynamics, and power relations in the formulation and implementation of social policies. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design through a literature review of government policy documents, official data, international agency reports, and relevant scientific journal articles published in the last five years. The results of the study show that poverty alleviation policies in Indonesia are not only influenced by economic considerations and the needs of the poor, but also by political interests, budgetary politics, and the influence of political elites and bureaucrats. Social assistance programs such as PKH, BPNT, and BLT play an important role in improving the welfare of the poor and the purchasing power of vulnerable households, but they still face various problems, especially related to targeting, social exclusion, and data management of beneficiaries. Therefore, this study emphasizes the importance of data-integrated, accountable social policies.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran negara, dinamika kepentingan politik, serta hubungan kekuasaan dalam perumusan dan implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, data resmi, laporan lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat miskin, tetapi juga oleh kepentingan politik, politik anggaran, serta pengaruh elit politik dan birokrasi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya beli rumah tangga rentan, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran, eksklusi sosial, dan tata kelola data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan sosial yang berbasis data terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan dapat mencapai tujuan jangka panjang secara lebih efektif.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **Pendahuluan**

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang menempati posisi sentral dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir pemerintah menunjukkan komitmen yang cukup kuat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa masalah kemiskinan belum sepenuhnya teratasi secara berkelanjutan. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi kerap bersifat fluktuatif dan rentan terhadap guncangan ekonomi, krisis kesehatan, maupun perubahan kebijakan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga berakar pada persoalan ketimpangan struktural, lemahnya perlindungan sosial, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Oleh karena itu, memahami kemiskinan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi teknokratis, tetapi juga dari sudut pandang politik dan institusional.

Dalam konteks tersebut, pendekatan ekonomi politik menjadi penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan dirumuskan dan diimplementasikan. Program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai skema perlindungan sosial lainnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan politik, relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh elite politik dan birokrasi. Kebijakan sosial sering kali tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kalkulasi politik, kebutuhan legitimasi kekuasaan, serta kepentingan aktor-aktor tertentu. Dalam praktiknya, hal ini dapat memengaruhi penentuan sasaran penerima manfaat, besaran alokasi anggaran, hingga mekanisme distribusi bantuan. Akibatnya, tujuan normatif pengentasan kemiskinan berpotensi bergeser menjadi instrumen politik, terutama dalam konteks kompetisi elektoral dan konsolidasi kekuasaan.

Selain itu, kompleksitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga terlihat dari relasi antara negara, pasar, dan aktor non-negara. Peran pemerintah sebagai perancang kebijakan sering kali berhadapan dengan keterbatasan kapasitas institusional, sementara keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif. Di tingkat daerah, otonomi yang dimiliki pemerintah lokal membuka ruang bagi inovasi kebijakan, tetapi sekaligus menimbulkan variasi dalam kualitas tata kelola dan akuntabilitas. Perbedaan kepentingan politik antara pusat dan

daerah, serta praktik birokrasi yang belum sepenuhnya bebas dari patronase dan kepentingan elite lokal, turut memengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran, eksklusivitas sosial, tumpang tindih program, hingga kebocoran anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan permasalahan utama mengenai bagaimana dinamika ekonomi politik memengaruhi perumusan, implementasi, dan hasil dari program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada peran negara dalam kebijakan sosial, kepentingan politik dalam distribusi bantuan, relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh elite politik dan birokrasi terhadap efektivitas kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui perspektif ekonomi politik, dengan menelaah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam konteks struktur kekuasaan dan kepentingan yang melingkupinya, serta bagaimana dampaknya terhadap ketimpangan sosial-ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

### **Kerangka Teori**

Ekonomi politik merupakan suatu pendekatan analitis yang menelaah keterkaitan antara struktur ekonomi dan sistem politik dalam proses perumusan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ekonomi politik menjadi semakin relevan karena kebijakan publik, khususnya kebijakan sosial dan pembangunan, tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar atau pertimbangan ekonomi rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan politik, serta agenda pemerintah. Penelitian Damara, Nasution, Nasution, dan Rahmansyah (2025) menunjukkan bahwa penyusunan anggaran negara dan kebijakan bantuan sosial kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, sehingga kebijakan sosial tidak sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial berpotensi bergeser fungsinya dari instrumen kesejahteraan menjadi alat politik fiskal yang strategis, terutama dalam konteks konsolidasi kekuasaan dan kepentingan elektoral.

Kemiskinan sendiri merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta sumber daya ekonomi dan sosial lainnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan kebijakan yang

komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sari, Rahayu, Salimah, Firmansah, dan Khoiriawati (2024) menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang hanya dapat ditangani secara efektif melalui kebijakan publik yang terkoordinasi, sehingga setiap program sosial tidak berjalan secara parsial, melainkan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran negara dalam merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial kelompok miskin.

Dalam praktik kebijakan sosial, peran negara tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan mekanisme pasar dan keterlibatan aktor non-negara. Negara berfungsi sebagai aktor utama melalui regulasi, alokasi anggaran publik, serta penyelenggaraan program jaring pengaman sosial. Namun, berbagai studi nasional menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di Indonesia sering melibatkan aktor non-negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas lokal, terutama dalam memperkuat distribusi dan pengawasan program bantuan sosial. Keterlibatan aktor non-negara menjadi penting ketika mekanisme pasar tidak mampu secara efektif menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial (Damara et al., 2025). Selain itu, penguatan sistem data sosial ekonomi melalui kebijakan Data Tunggal Nasional dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan peran berbagai aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang lebih akurat, responsif, dan tepat sasaran (Setyanto, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa kelemahan utama program pengentasan kemiskinan di Indonesia terletak pada aspek tata kelola dan akurasi penargetan. Fatmawati dan Mulazid (2024) menemukan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran, yang mengurangi efektivitas program dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola kebijakan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Sejalan dengan itu, Setyanto (2025) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang sangat bergantung pada pemutakhiran data terpadu yang berkelanjutan, sehingga efektivitas kebijakan sosial dapat diukur secara lebih akurat dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dapat dievaluasi secara objektif

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami kebijakan pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik. Pendekatan ini

dipilih karena kemiskinan dipandang tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, politik, dan kelembagaan. Penelitian berfokus pada analisis peran negara, elite politik, birokrasi, serta aktor non-negara dalam perumusan dan implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui telaah kebijakan publik, dokumen resmi, dan literatur akademik yang relevan.

Data yang digunakan bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui studi literatur terhadap dokumen kebijakan pemerintah, publikasi ilmiah lima tahun terakhir, laporan lembaga internasional, serta policy briefs dari lembaga kajian. Analisis data dilakukan secara tematik dan kritis dengan kerangka ekonomi politik, meliputi proses seleksi data, pengelompokan tema, dan sintesis interpretatif untuk memetakan dinamika kekuasaan, tata kelola, dan distribusi sumber daya dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder dan fokus kajian pada tingkat nasional, sehingga variasi implementasi di tingkat daerah belum dianalisis secara mendalam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Dinamika Ekonomi Politik dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**

Dinamika ekonomi politik dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial merupakan hasil interaksi kompleks antara peran negara, kepentingan politik, relasi kekuasaan, serta pengaruh elite dan birokrasi. Negara memegang posisi sentral dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui penyusunan regulasi, penentuan prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran yang bersifat redistributif. Pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait, berfungsi sebagai perancang kebijakan makro dan penentu standar nasional program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi negara ini berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara agregat, terutama dalam konteks perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi kebijakan, serta kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kondisi sosial-ekonomi lokal (Marsitadewi & Sudemen, 2025; Susanti, 2025).

Dalam praktik implementasi, kebijakan pengentasan kemiskinan dihadapkan pada tantangan struktural yang berasal dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Sejumlah studi

mengungkapkan bahwa distribusi bantuan sosial tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik, khususnya dalam konteks kontestasi elektoral. Fenomena *political budget cycle* menunjukkan bahwa anggaran bantuan sosial cenderung meningkat pada periode menjelang pemilu, yang mengindikasikan bahwa kebijakan bansos kerap dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun dukungan politik.

Politisasi bantuan sosial ini berdampak pada pergeseran orientasi kebijakan dari pemberdayaan jangka panjang menuju kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketidaktepatan sasaran, bias distribusi, dan melemahnya prinsip keadilan sosial. Beberapa penelitian juga mencatat bahwa praktik patronase dalam distribusi bantuan memperkuat ketergantungan masyarakat miskin terhadap aktor politik tertentu, sehingga menghambat terbentuknya kemandirian ekonomi dan partisipasi politik yang kritis (Damara & Nasution, 2025; Purba et al., 2025).

Relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah semakin memperlihatkan kompleksitas ekonomi politik dalam pengentasan kemiskinan. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun pada saat yang sama menciptakan kesenjangan kapasitas antar daerah. Pemerintah pusat tetap mendominasi dalam penentuan desain program dan alokasi anggaran, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih program, serta ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal dan administratif yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif, sehingga memperbesar ketimpangan antarwilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa relasi pusat-daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan yang memengaruhi distribusi sumber daya dan hasil kebijakan (Suyasa et al., 2024).

Selain itu, pengaruh elite politik dan birokrasi memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dan hasil kebijakan pengentasan kemiskinan. Elite politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, sering kali memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan penerima manfaat program sosial. Hubungan patron-klien yang terbentuk antara elite politik, aparat birokrasi, dan masyarakat miskin menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kebijakan. Di sisi lain, birokrasi yang kurang profesional dan masih diwarnai praktik administratif yang tidak efisien berkontribusi terhadap permasalahan data penerima bantuan, keterlambatan distribusi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Berbagai studi menegaskan bahwa tanpa reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme pengawasan, kebijakan pengentasan kemiskinan berisiko menjadi instrumen kekuasaan elite daripada alat transformasi sosial. Dengan demikian, dinamika ekonomi politik dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah program, tetapi oleh kemampuan negara dalam mengelola kepentingan politik, membatasi dominasi elite, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membangun tata kelola kebijakan yang transparan dan berkeadilan (Haliim & Fatkhurrohman, 2025).

## **B. Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik**

### **1. Analisis Program Bantuan Sosial (PKH, BPNT, BLT, dll.)**

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin serta meningkatkan akses mereka terhadap layanan sosial penting. Penelitian menyatakan bahwa berbagai program seperti PKH, BPNT, dan BLT terus dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga tidak mampu (Wardani, 2024).

Selain itu, bantuan sosial tunai seperti BLT juga dianggap berperan dalam pemerataan ekonomi, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mendorong pemerataan pendapatan (Pahrudin, Fitri, & Gusti, 2024). Program-program tersebut secara institusional merupakan bentuk intervensi negara untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dan mengatasi kemiskinan struktural yang terjadi akibat ketidakmerataan distribusi sumber daya.

Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan bantuan sosial tidak terlepas dari mekanisme politik anggaran dan alokasi sumber daya negara. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk program jaring pengaman sosial, terutama pada masa krisis atau pandemi, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh prioritas politik, keadaan ekonomi, dan dinamika fiskal negara. Dalam penelitian kebijakan anggaran sosial disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan jumlah penerima bantuan BPNT dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dan total anggaran perlindungan sosial bahkan mencapai ratusan triliun rupiah ketika terjadi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya untuk program sosial merupakan keputusan

politik dan ekonomi sekaligus. Di tingkat lokal, dana desa maupun APBDes juga digunakan untuk menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh baik keputusan politik nasional maupun kebijakan fiskal lokal (Jibrán, 2024).

## **2. Isu Ketepatan Sasaran dan Eksklusi Sosial**

Salah satu persoalan utama dalam implementasi bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran dan eksklusi sosial. Beberapa penelitian menemukan bahwa penyaluran bantuan sosial menghadapi kendala seperti data penerima tidak akurat, penyaluran tidak tepat waktu, serta kualitas bantuan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian mengenai BPNT menemukan bahwa terdapat masalah ketepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat (Sahara, Anwar, & Darmi, 2023).

Selain masalah teknis, terdapat pula isu bias kebijakan akibat basis data penerima yang kurang mutakhir sehingga terjadi kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian lain menemukan bahwa efektivitas program bantuan sosial sering terkendala oleh data penerima yang tidak akurat, koordinasi antarpemangku kepentingan yang kurang efektif, serta besaran bantuan yang tidak sebanding dengan biaya hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program sosial dirancang untuk mengatasi kemiskinan, persoalan implementasi kebijakan seringkali menciptakan ketidakadilan baru dalam bentuk eksklusi kelompok miskin tertentu dari akses terhadap bantuan.

Dari perspektif ekonomi politik, program bantuan sosial memiliki dampak ganda terhadap ketimpangan sosial-ekonomi. Di satu sisi, program bantuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, memperkuat daya beli, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya, sehingga berkontribusi mengurangi ketimpangan. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan akses mereka terhadap kebutuhan dasar (Husain et al., 2025).

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya efek negatif seperti ketergantungan terhadap bantuan, kesenjangan antarkelompok penerima dan non-penerima, serta disparitas hasil yang dipengaruhi oleh faktor gender, lokasi, atau status sosial (Simbolon, 2024). Oleh karena itu, efektivitas program pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang mensyaratkan integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi dan perbaikan tata kelola program sosial, bukan hanya pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin.

### **C. Tantangan dan Implikasi Kebijakan**

Tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia terletak pada ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi serta terbatasnya kapasitas lembaga pemerintah. Kehidupan miskin yang bersifat struktural dipengaruhi oleh ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang resmi, dan infrastruktur hal-hal ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan sosial yang sementara.

Dari sisi kelembagaan, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai kementerian, sering kali belum berjalan dengan baik. Situasi ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan dan adanya tumpang tindih program, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas dalam usaha pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai dasar untuk merumuskan program masih terhambat oleh masalah integrasi dan pengelolaan data yang efisien, sehingga rencana penanganan kemiskinan belum sepenuhnya berdasarkan pada data yang valid. Dalam konteks ekonomi dan politik, ketidakseimbangan dalam struktur kekuasaan dan dominasi elite ekonomi-pemerintah biasanya cenderung mendukung kepentingan kelompok tertentu, sehingga kebijakan redistribusi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Masalah pengelolaan menjadi hambatan yang besar dalam keberhasilan program-program pengurangan kemiskinan. Sering kali terdapat kekurangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama di antara lembaga-lembaga, yang mengakibatkan program-program sosial seperti bantuan tunai langsung atau bantuan pangan tidak selalu mengenai sasaran yang tepat.

Praktik politisasi bantuan sosial menjelang pemilihan umum tertentu juga dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengalihkan fokus kebijakan dari tujuan jangka panjang untuk memberdayakan ekonomi ke tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan pemilihan. Kepentingan politik dapat memengaruhi prioritas dalam penganggaran, yang terkadang merugikan program-program anti-kemiskinan yang lebih substansial.

Kendala dalam tata kelola ini semakin diperburuk oleh belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa program-program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dampak dari tantangan dalam struktur dan manajemen sangat terlihat pada usaha untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal menghapus kemiskinan (SDG 1). Ketika kebijakan tidak mampu menjangkau penyebab utama kemiskinan secara

komprehensif termasuk ketidakadilan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi usaha untuk mengembangkan secara berkelanjutan akan terhalang.

Pendekatan ekonomi politik menyoroti pentingnya perubahan struktural dalam kebijakan yang lebih mendalam daripada sekadar program bantuan sosial. Ini meliputi reformasi dalam redistribusi sumber daya, pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal, peningkatan kualitas manajemen, serta penguatan peran institusi demokratis untuk menjamin bahwa kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi politik yang melibatkan kepentingan politik, struktur kekuasaan, dan tata kelola kebijakan. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh persoalan politik anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta kelemahan data dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang melalui perbaikan tata kelola, pemutakhiran data terpadu, serta penguatan kebijakan pemberdayaan ekonomi agar mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Damara, M. D., & Nasution, K. F. D. (2025). Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2753–2759. (<https://www.researchgate.net/publication/398139915>)
- Damara, M. D., Nasution, K. F. D., Nasution, B. A., & Rahmansyah, A. (2025). Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *RIGGS: Journal of Government and Social Studies*, 4(4), 1–20. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3835>
- Fatmawati, F., & Mulazid, A. S. (2024). Peran Strategis Kementerian Sosial bagi Penguatan Program Bantuan Pangan Non-Tunai Pasca COVID-19. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(1), 62–73. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/38166>
- Haliim, W., & Fatkhurrohman, M. (2025). Relasi kuasa dan klientelisme pada budaya politik

- masyarakat miskin Indonesia. Jurnal PDP.  
(<https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/5965>)
- Husain, P. A., Hasiru, R., Damiti, F., Mahmud, M., & Ardiansyah, A. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Program Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa Pelita Hijau Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2).
- Jibran, R. I. (2024). Upaya Pemerintah Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Batuah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(9).
- Marsitadewi, E., & Sudemen, I. W. (2025). Pola intervensi pemerintah melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/92280>)
- Pahrudin, Z. S., Fitri, A. N., & Gusti, S. A. R. (2024). Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(1).
- Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2024). Government Intervention Strategy in Poverty Reduction: Study on the District and City in Indonesia Across 2016–2023. *Jurnal Bina Praja*. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/2331/717/12361>
- Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M. C., Togatorop, J., & Harahap, L. M. (2025). Peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*. (<https://ejournal.politeknipratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/4956>)
- Rianto, R. (2024). The Effectiveness of Social Assistance Program Food on Poverty Reduction in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2).
- Sahara, F., Anwar, F., & Darmi, T. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 4(2).
- Sari, N. D., Rahayu, N. D., Salimah, B. S., Firmansah, N. M. H., & Khoiriawati, N. (2024). Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 14–25. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/2112>
- Sendouw, R. H. E. (2025). Political Economic Reforms Necessary to Alleviate Poverty in Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 1300–1306. <https://jcasc.com/index.php/jcasc/article/view/1773/270>

- Setyanto, W. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, dan Pembangunan Berkelanjutan: Pengalaman Indonesia. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 34(1), 266–284. <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/view/16154>
- Shaputri, Y. R., Ikhzwan, M., & Sapril, N. (2025). Kebijakan Penetasan Kemiskinan sebagai Strategi Penurunan Stunting: Pendekatan Ekonomi Politik. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*. <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/16154/3150/60980>
- Simbolon, R. S. (2024). Analyzing the Impact of Social Assistance Programs on Poverty Alleviation in Karo Regency. *Law and Economics*, 16(3).
- Supriyanto, E. E. (2025). Policy for Eliminating Extreme Poverty with an Entrepreneurial Ecosystem: A Poverty Reduction Policy Design. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT/article/download/1167/1368/5805>
- Susanti, E. (2025). Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan perspektif ekonomi Islam. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/19079>)
- Suyasa, I. M. G., Retnosari, L., & Taufiq, N. (2024). Tepatkah program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia?. *Salus Cultura*. (<https://jurnal.kemenkopmk.go.id/index.php/saluscultura/article/view/156>)
- Wardani, F. K. (2024). Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Dusun Ketalo, Bantul. *Jurnal Riset Daerah*, 24(2).